

Muhammad Rasyid Prasmi

Staff Ahli DPRD Wakatobi

Email: Prasmirasyid@yahoo.co.id

Ulung Pribadi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ulungpribadi@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0047>

Inovasi Kelembagaan Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRACT

The background of this study is to see that the Social Service Special Region of Yogyakarta, which is one of the agencies involved in the handling of social welfare problems in view the demands and permasalahan social welfare are increasingly complex, the Department of Social Welfare in answering this demand by institutional innovation by establishing new institutional namely Technical Services Unit (UPTD) Integrated Rehabilitation Center for persons with Disabilities (BRTPD) with persons with disabilities blind, mentally disabled, physically disabled, deaf, and mute. In this study, the type of research that will be used is descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are in the form of documentation, interviews, and observation / direct observation. The data analysis is conducted by means of data collection, data assessment, data interpretation, and conclusion, which is adapted to the prevailing theory and recognized, on a variable institutional innovation indicators vision and strategy, gluing basic kpetensi, strengthening information and intelligence organizations, market orientation and customers, creativity and idea management, systems and organizational structures, management ideas and also variable factors that influence institutional innovation with indicators of internal bureaucracy, the political environment, the external environment. Results from this study indicate that the institutional innovation UPTD Integrated Rehabilitation Center for Persons with Disabilities conducted Social Service in outline with menggukan indicators in this study strongly support the creation of institutional innovation UPTD Integrated Rehabilitation Center for Persons with Disabilities. Factors that influence institutional innovation is internal bureaucracy that human resources are still limited in terms of quality and quantity, the political environment is not yet fully support the budget, and the environment outside the public sector (external) that is too high expectations of the public are not comparable with capacity owned by hall integrated rehabilitation of persons with disabilities. Key words: Institutional Innovation, Innovation Capability

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah melihat bahwa Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu instansi yang terkait dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam melihat tuntutan dan permasalahan kesejahteraan sosial yang makin kompleks maka Dinas Sosial dalam menjawab tuntutan itu dengan melakukan inovasi kelembagaan dengan membentuk kelembagaan baru yaitu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang menangani penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu, dan wicara Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi/pengamatan langsung. Teknik analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, penilaian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan, yang disesuaikan dengan teori yang berlaku dan diakui, atas variabel inovasi kelembagaan dengan indikator visi dan strategi, perekatan dasar kpetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, manajemen gagasan dan juga variabel

faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi kelembagaan dengan indikator internal birokrasi, lingkungan politik, lingkungan eksternal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial secara garis besar dengan menggunakan indikator yang ada dalam penelitian ini sangat mendukung terciptanya inovasi kelembagaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi kelembagaan tersebut adalah internal birokrasi yaitu sumber daya manusia yang masih terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas, lingkungan politik yaitu belum sepenuhnya mendapatkan dukungan anggaran, dan lingkungan diluar sektor publik (eksternal) yaitu harapan yang terlalu tinggi dari masyarakat tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas.

Kata kunci: Inovasi Kelembagaan, Kemampuan Inovasi

PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi organisasi sektor publik di daerah dituntut untuk melakukan inovasi baik melalui pengembangan kelembagaan, program maupun pelayanan yang akan dilaksanakan oleh instansi maupun lembaga daerah. (Hills, 2008) mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit pengguna lainnya. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan menjawab persoalan-persoalan dan kebutuhan masyarakat terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dengan memberi penghargaan “Pemerintah Daerah Inovatif atau *Innovative Government Award (IGA)*” yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemberian penghargaan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Gamawan Fauzi, 2013). Penghargaan inovatif kepada Pemerintah Daerah ada 4 (empat) kategori, yakni (<http://www.kemendagri.go.id/news/2013/12/05/>): (1) tata kelola pemerintahan; (2) pelayanan publik; (3) pemberdayaan masyarakat; dan (4) peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan 4 (empat) kategori tersebut, secara bertahap dilakukan penilaian untuk menetapkan Pemenang IGA.

Inovasi saat ini menjadi suatu keharusan dalam birokrasi pemerintah daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena merupakan amanat konsitusi. Namun kenyataannya belum banyak pemerintah daerah sekarang ini yang menerapkan inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Dari keseluruhan jumlah pemerintah daerah yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, diperkirakan tidak lebih dari 10 % yang menonjol dalam inovasi. Pada umumnya, pemerintah daerah memberlakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagai rutinitas, *business as usual*. Berbagai upaya pemerintah untuk mendorong inovasi pada birokrasi melalui berbagai penghargaan, juga tidak banyak menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian inovasi belum menjadi unsur penting dari budaya birokrasi pemerintah. Hal demikian ini juga mengindikasikan bahwa birokrasi pemerintah sekarang belum mampu memenuhi amanat konsitusi juga menyerap dan mengembangkan nilai-nilai manajemen yang lebih maju. Penyebab kondisi tersebut sebagaimana dijelaskan (Agus Dwiyanto, 2006), bahwa rendahnya inovasi birokrasi pemerintah dikarenakan struktur birokrasi yang sangat hirarkis, terkotak-kotak dan rigid. Akan tetapi, hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini diperlukan, karena fakta menunjukkan bahwa perilaku birokrasi pemerintah juga belum mencerminkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai birokrasi. Hasil penelitian (Agus Dwiyanto, 2006) yang dilaksanakan pada tahun 2000 dan (Eko prasojo, 2006) pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa ketidak patuhan terhadap prosedur dan lemahnya pengawasan masih menjadi ciri dari birokrasi pemerintah.

Saat ini pemerintah DIY telah menggulirkan berbagai program penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan mengacu pada peraturan daerah seperti Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

628 Disabilitas, dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan dan perda-perda lain yang berkaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Meskipun berbagai program telah dijalankan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial namun masih belum sesuai harapan karena masih banyaknya permasalahan.

Adapun masalah yang dihadapi (Lakip Dinas Sosial DIY 2014) adalah: (1) masih banyak fakir miskin yang perlu mendapatkan pelayanan, (2) penyalahgunaan napza di DIY yang mengalami kecenderungan adanya peningkatan jumlah pengguna, (3) permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di DIY cukup tinggi sehingga kontraproduktif dengan predikat DIY sebagai pusat budaya dan pendidikan. Adapun jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di DIY pada tahun 2013 (Dinsos 2013) terdapat sebanyak 132.238 fakir miskin, 1.471 korban napza, 26.149 anak terlantar, 36.728 lanjut usia terlantar, 28.196 penyandang disabilitas, 129 gelandangan, dan 221 pengemis. Dari permasalahan dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2013 diatas maka dapat dikatakan bahwa masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga keadaan ini lah pemerintah DIY didorong untuk melakukan pengembangan inovasi.

Dalam rangka menunaikan kewajibannya Dinas Sosial telah ikut ambil bagian dengan melakukan pengembangan inovasi melalui pembentukan kelembagaan yang dilakukan Dinas Sosial dengan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional. UPTD yang dibentuk Dinas Sosial seperti panti sosial dan balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas yang keseluruhan jumlahnya terdiri dari enam panti sosial dan satu balai rehabilitasi yang merupakan unsur pelaksana teknis dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.

Ketuju Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk ini merupakan pengembangan inovasi kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sesuai dengan amanat konsitusi. Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk melakukan inovasi dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pengembangan inovasi kelembagaan Dinas Sosial DIY telah mendirikan panti sosial dan balai rehabilitasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adapun panti sosial dan balai rehabilitasi yang didirikan antarlain sebagai berikut: 1. Panti Sosial Karya Wanita, 2. Panti Sosial Bina Karya, 3. Panti Sosial Bina Remaja, 4. Panti Sosial Asuhan Anak, 5. Panti Sosial Tresna Werdha, 6. Panti Sosial Pamardi Putra, 7. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas.

Dari ketujuh UPTD diatas dalam penelitian ini akan difokuskan untuk melihat proses pengembangan inovasi kelembagaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Alasan peneliti fokus terhadap pengembangan inovasi kelembagaan balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas dikarenakan jumlah penyandang disabilitas masuk dalam ketiga terbesar jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di DIY, dimana jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2013 di DIY mencapai 28.196 orang. Selain alasan tersebut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya harus dipenuhi sebagai mana telah dijelaskan dalam perda ini bahwa penyandang disabilitas di DIY adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pengembangan inovasi kelembagaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilita ini Dinas Sosial tidak

630

terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pengembangan inovasi melalui pembentukan kelembagaan untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini adalah sebagai berikut: belum ada aturan yang jelas mengenai keberadaan UPTD dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis, mengingat pelaksanaan otonomi, (uji coba) juga belum berlangsung dengan baik, Sumberdaya manusia yang belum mendukung, Kebijakan dari pemerintah pusat yang belum jelas mengenai tindak lanjut dari uji coba otonomi. Yang dimana permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang semakin kronis dan permasalahan sosial yang bersifat konvensional lainnya seperti: keterlantaran, kecacatan, ketunaan, disamping permasalahan aktual lainnya seperti: konflik sosial juga masih memerlukan perhatian, kurangnya akses pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial, rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pekerja sosial, terbatasnya kemampuan SDM dan teknologi untuk memprediksi kejadian bencana, meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan sosial memerlukan penanganan yang serius dan harus segera ditangani.

KERANGKA TEORI

INOVASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Suatu organisasi maupun orang yang selalu berinovasi, maka dapat dikatakan sebagai organisasi/orang yang inovatif. Inovasi menurut west dan far (Ancok, 2012:34) adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas. Sedangkan Inovasi menurut (Suryana, 2003) yaitu sebagai kemampuan untuk

menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). Sedangkan menurut (North, 1990) kelembagaan adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, (North, 1990) juga menjelaskan mengenai pengertian lembaga yaitu sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi.

Praktek inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah di Indonesia telah diungkapkan dalam sejumlah literatur. Beberapa daerah yang sering menjadi rujukan sebagai *best practices* penerapan inovasi antara lain adalah Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jember. Menilik kinerja ketiga daerah tersebut, terbukti inovasi sangat diperlukan bagi birokrasi pemerintah dalam proses reformasi. keberhasilan para pemimpin daerah tersebut dalam menerapkan dan mengembangkan inovasi adalah karena strategi dan kebijakan yang mereka kebangkan selama masa kepemimpinannya telah memberikan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kunci dari kinerja ini adalah inovasi. Melalui inovasi mereka mampu meningkatkan kinerja daerah yang dipimpinnya secara signifikan (Asropi, 2008, Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi).

Kisah keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh Gorontalo, Sragen, Jember, kota surabaya dan banyuwangi ini sebenarnya

632 telah banyak menginspirasi daerah-daerah lain untuk melakukan inovasi. Seiring dengan hal tersebut, inovasi kemudian menjadi kata yang populer di lidah dan telinga penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangan sekarang ini, inovasi bahkan diyakini sebagai keharusan bagi pemerintah daerah. Dasar pemikirannya adalah bahwa inovasi telah terbukti meningkatkan efektivitas pemerintah daerah, yang telah ditunjukkan terutama oleh ketiga daerah yang telah disebutkan. Lebih dari itu, inovasi diperlukan dalam menghadapi kondisi lingkungan pemerintah daerah dewasa ini. Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999, pemerintah daerah selain memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan di tingkat daerah, juga memiliki kewajiban yang besar untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Dalam konteks ini inovasi diperlukan agar kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat (Asropi, 2008, Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi).

KEMAMPUAN INOVASI PEMERINTAH

Secara teoritik, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep “*innovation capability*” atau kemampuan inovasi. Menurut Terziovski (2007), kemampuan inovasi ini menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang efektif. Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah kemampuan inovasi dari masing-masing lembaga pemerintah lah yang sesungguhnya sangat berperan dalam penciptaan kreatifitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan Terziovski (2007) bahwa keberhasilan inovasi kelembagaan pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa dimensi kemampuan inovasi antarlain meliputi: visi dan strategi, perekatan dasar kompetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen

gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi.

633

Mengacu pada definisi Lawson dan Samson (2001) tentang kemampuan inovasi, kemampuan inovasi birokrasi pemerintah dimaknai sebagai kemampuan birokrasi pemerintah untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan ke dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan sistem yang baru, bagi keuntungan lembaga dan stakeholder. Beranjak dari pemahaman ini, maka kemampuan inovasi birokrasi pemerintah bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi ia berkaitan dengan berbagai aspek manajemen, kepemimpinan, dan aspek teknis seperti alokasi sumberdaya stratejik, pemahaman kepentingan stakeholders, dan lain-lain.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi birokrasi pemerintah, berakibat kemampuan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan inovasi berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dikenali, terutama untuk membangun strategi yang memadai bagi peningkatan kemampuan inovasi suatu lembaga pemerintah. Hanya saja, pengenalan terhadap faktor-faktor tersebut, bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan, pada lembaga-lembaga yang sudah berhasil melakukan inovasi sekalipun, hanya sedikit yang memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya inovasi (Assink, 2006), kesulitan ini juga dialami oleh birokrasi pemerintah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Seangkan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi dari penelitian ini adalah di Dinas Sosil DIY sebagai pihak yang melakukan inovasi kelembagaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi/pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, penilaian data,

634 interpretasi data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

INOVASI KELEMBAGAAN UPTD BRTPD DI DINAS SOSIAL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil temuan dilapangan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun hasil dari temuan dalam penelitian ini Dinas Sosial DIY menciptakan inovasi kelembagaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas. inovasi kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY merupakan langkah yang diambil untuk mendukung program pemerintah DIY dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga dengan adanya inovasi kelembagaan ini penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas lebih mudah mendapatkan pelayanan yang lebih baik karena ditangani oleh satu lembaga.

Keberhasilan inovasi kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak semata-merta berdiri sendiri, namun dibutuhkan sumber daya yang mumpuni dan memadai. Keberhasilan Dinas Sosial DIY dalam melakukan inovasi kelembagaan didukung oleh kemampuan inovasi yang ditunjang oleh beberapa dimensi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, beberapa dimensi tersebut adalah: visi dan strategi, perekatan dasar kompetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi (Terziovski, 2007).

VISI DAN STRATEGI

Menurut Kotler yang dikutip oleh Nawawi (2000) Visi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat

ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sedangkan strategi menurut Menurut Rangkuti (2006) adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengaruh dari visi dan strategi yang dimiliki Dinas Sosial sangat lah mendukung untuk pengembangan sebuah inovasi kelembagaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD). Karena dalam visi dan strategi Dinas Sosial sangat jelas mengakomodir terciptanya sebuah gagasan, kreativitas maupun inovasi yang telah dijabarkan dalam visi dan strategi dari Dinas Sosial. Yang dimana visi dari Dinas Sosial adalah terwujudnya kemandirian masyarakat menuju kesejahteraan sosial. Visi Dinas Sosial ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan kemandirian masyarakat menuju kesejahteraan sosial harus melalui akses pemberian pelayanan yang mudah. Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah tersebut maka dibentuk lah UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Begitu juga dengan strategi yang dimiliki dimana salah satu strategi Dinas Sosial adalah penguatan kelembagaan artinya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui pendayagunaan kelembagaan yang telah berkembang dan atau dibentuk.

PEREKATAN DASAR KOMPETENSI

Perekatan dasar kompetensi adalah salah satu hal yang penting dalam terciptanya sebuah inovasi kelembagaan dalam sebuah organisasi pemerintah terutama kompetensi yang dimiliki pegawai, karena kompetensi pegawai sangat penting dan dibutuhkan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi salah satunya dalam membangun suatu inovasi guna memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat sehingga permasalahan masyarakat dapat terjawab.

Menurut Spencer dan Spencer dalam Hamzah B. Uno (2007: 63), kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama.

Untuk peningkatan kompetensi pegawai Dinas Sosial memiliki program peningkatan kapabilitas manajemen aparatur artinya bahwa peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan SDM yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan kapabilitas ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dimana diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan formal (diklat) yang dimana hasilnya mampu meningkatnya pengetahuan dasar bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kegiatan forum optimalisasi pengembangan kinerja aparatur dengan capaian hasil adanya komunikasi dan informasi timbal balik sehingga permasalahan dan tugas-tugas kedinasan dapat diselesaikan dan berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa perekatan dasar kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangat mendukung adanya inovasi kelembagaan.

PENGUATAN INFORMASI DAN KECERDASAN ORGANISASI

Menurut Azhar Susanto (2004:46) dalam bukunya *Sistem Informasi Akuntansi* mendefinisikan informasi sebagai hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat sedangkan kecerdasan organisasi diartikan sebagai kemampuan memproses, menafsirkan, mengkodekan, memanipulasi dan mengakses informasi dalam sebuah tujuan yang diarahkan sehingga dapat meningkatkan potensi adaptif terhadap lingkungan yang ada dan juga dapat meningkatkan kualitas dari sebuah organisasi sehingga organisasi dapat dengan mudah mempelajari customer dan competitor dengan menggunakan kecerdasan organisasi.

Penguatan informasi yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan menggunakan teknologi website sebagai sumber informasi dan menerima informasi berupa aspirasi yang ingin disampaikan oleh

masyarakat, dengan menggunakan kecerdasan organisasi berupa kemampuan aparatur, sistem, struktur organisasi yang mendukung sehingga semua informasi dapat dikelola dengan baik. Dengan kecerdasan organisasi yang dimiliki Dinas Sosial berupa kemampuan aparatur, sistem yang mendukung, struktur yang memadai sehingga informasi dapat dikelola dengan baik dan dari pengelolaan informasi tersebut maka permasalahan masyarakat dapat diketahui dan dijawab dengan adanya sebuah inovasi kelembagaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

ORIENTASI PASAR DAN PELANGGAN

Untuk melihat keberhasilan dari sebuah inovasi kelembagaan harus adanya dukungan dari dimensi orientasi pasar dan pelanggan, pelanggan merupakan masyarakat umum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah karena pada hakekatnya pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal karena merupakan tugas yang telah diberikan kepada pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan hal itu merupakan amanat undang-undang.

Keberadaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang merupakan pengembangan inovasi kelembagaan yang dilakukan Dinas Sosial ini mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat karena mereka merasa terbantu dan lebih maksimal dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini terbukti dari kapasitas yang dimiliki oleh balai reabilitasi terpadu penyandang disabilitas telah terisi penuh oleh penyandang disabilitas yang sekarang mendapatkan tempat yang layak dan terurus.

KREATIVITAS DAN MANAJEMEN GAGASAN

Menurut Ghufron dan Risnawita (2011) kreativitas adalah unsur kekuatan sumber daya manusia yang ada untuk menggerakkan kemajuan manusia dalam penelurusan, mengembangkan, dan

638 penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha manusia. Sedangkan gagasan adalah sebuah interaksi tentang apa yang berhasil ditangkap oleh pikiran merupakan yang tersusun dari hasil pemikiran dan selanjutnya akan di tuangkan melalui bahasa, baik secara tulisan, maupun lisan dan kemudian akan di implementasikan dengan tindakan yang kongkrit.

Kreativitas dan manajemen gagasan sangat diperhatikan oleh Dinas Sosial dalam rangka untuk mendukung pencapaian-pencapaian kinerja yang ingin dicapai. Pegawai Dinas Sosial diberikan peluang dan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dengan cara memberikan ruang gerak kepada setiap pegawainya untuk bisa menunjukkan gagasan yang kreatif dan ide-ide inovatif yang dimilikinya. Adapun ruang yang diberikan tersebut melalui kebijakan pimpinan yang membebaskan pegawai dalam memberikan masukan dan menyampaikan ide-ide inovatifnya tiap dilaksanakannya rapat pimpinan dan pada saat evaluasi kegiatan.

SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI

Menurut (Jogiyanto, 2003:34) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu seangkan Struktur organisasi merupakan rancangan dari pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan harapan-harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu-individu dan kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Ivancevich, 2007:235).

Dukungan sistem dan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam lahirnya inovasi kelembagaan ini dapat dilihat dari beberapa sistem yang dibangun oleh Dinas Sosial. Adapun sistem yang dibangun oleh Dinas Sosial dalam mendukung adanya inovasi kelembagaan ini adalah sistem jaringan teknologi seperti website,

sistem keuangan yang terkoneksi dengan menggunakan jaringan (*online report center*) dan juga sistem wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang merupakan sistem jaringan antar Keperangkatan Pelayanan Sosial (KPS). Sementara itu dukungan struktur organisasi adalah adalah struktur organisasi yang dimiliki Dinas Sosial tidak kaku sangat fleksibel ketika ada masalah yang dihadapi semua pegawai dilibatkan dalam memberikan masukan maupun solusi pimpinan tidak semerta-merta menyelesaikan sendiri.

MANAJEMEN TEKNOLOGI

Manajemen teknologi adalah ilmu yang menjembatani antara kajian manajemen, rekayasa / teknik dan ilmu pengetahuan (*sciences*). Menurut Miarso (2007: 62) teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem.

Untuk menunjang program kegiatannya Dinas Sosial telah dilengkapi dan menggunakan teknologi, seperti: menggunakan komputer yang dilengkapi dengan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dari PMKS kemudian di up date kedalam website, menggunakan teknologi tv dan radio sebagai media untuk menyampaikan sosialisasi dan informasi-informasi lain yang terkait dengan penanganan PMKS. Dengan adanya pemanfaatan teknologi yang dilakukan Dinas Sosial dalam menunjang program kegiatannya menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan Dinas Sosial sangat mendukung pengembangan inovasi kelembagaan yang dilakukan Dinas Sosial.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan

UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial secara garis besar dengan mengukukan indikator visi dan startegi, perekatan dasar kopetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, manajemen gagasan yang dimiliki Dinas Sosial sangat mendukung terciptanya inovasi kelembagaan UPTD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang menangani penyandang disabilitas netra, daksa, rungu, dan wicara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aisyah, Dara, 2003, *Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi*, Usu Digital Library, Diakses tanggal 30 November 2008.
- Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Ancok, Djamaludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Awan Santosa dkk, 2003, Jurnal, *Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*.
- Bappenas, 2008. *Rencana Kerja Pemerintah, lampiran buku II peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Badan Prencanaan Pembangunan Nasional.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah*. Jakarta: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- Hadiyati, Ernani. 2011. *Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil*: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume.13, Nomor. 1, hlmn. 8-16.
- Hills, Gerald. 2008. *Marketing and Entrepreneur-ship, Research Ideas and oportunities*: Journal of Small and Medium Entrepreneur-ships, page. 27-39.
- Ivancevich, John M. Konopaske, Robert. Matteson, Michael T. 2007. *Perilaku Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta: Salemba Humanika
- Lubis, Dj. 2004. *Strategi penanggulangan kemiskinan nasional*. Jakarta: TKP3KPK: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- M. Steers, Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi: kaidah perilaku*. Jakarta: Erlangga
- Muluk, Khairul M.R. 2008. *KnowledgeManagement: Kunci Sukses Inovasi*

- Pemerintah Daerah. Malang: Banyumedia Publishing.
- North, North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Paskarina Caroline. 2009. *Inovasi, Orientasi Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Padjadjaran.
- Remi, S.S, dkk. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Edisi Indonesia Inggris. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Konsep, Struktur, Proses*, Jakarta: Arcan
- Rogers, E.M., and Shoemaker, EF. (1971). *Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach, Second Edition*. New York: The Free Press
- Ruttan dan Hayami. 1984. *Toward a theory of induced institutional innovation*, Journal Of Development Studies.
- Setijaningrum, Erna. 2009. *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: Kanisius.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN.
- Wibawa, Fahmi (ed). 2004. *Inovasi sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award*. Jakarta: Kemitraan dan Jawa Pos Institute
- Otonomi Daerah.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Insan Cendekia.
- Yuni, Prabowo, Wisnu. 2015. *Inovasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di UPT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen)*: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Volume. 15, Nomor 2.
- Zaltman, Duncan. (1973). *Innovation and Organization*, A Wiley-Interscience Publication John Wiley and Sons, New York. London, Sydney, Toronto.
- Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Permenpan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial.

- Anggraeny, Cindy. 2013. *Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya*: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume. 1, Nomor. 1.
- Asropi. 2008. *Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi*: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume V, Nomor 3, halmn. 246-255.
- Ernawati. 2012. *Inovasi Untuk Orientasi Baru Otonomi Daerah*: Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2.
- Dzunuwanus, Kushadayani. 2013. *Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPMMPD) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomer 2.
- Muttaqin, Andhyka. 2011. *Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayanan Publik*: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 2, No. 1.
- Wijayanti, Sri Wahyuni. 2008, *Inovasi Pada Sektor Pelayanan Publik*: Jurnal Administrasi Publik, Volume. 4, Nomor. 4, hlmn 39-50.